



RENJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2027

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

RENJA TAHUN 2027 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6)
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 110);
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2027 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuannya sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam implementasi RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci). Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

2.2. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.

2.3. Inovasi Perangkat Daerah

Bagian ini memberikan penjelasan tentang inovasi perangkat daerah yang membantu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.2. Arah kebijakan

Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan secara detail Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2027.

4.1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.

4.2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan prioritas perangkat daerah beserta aktivitas, indikator, target, dan anggaran yang mendukung TRILAS / Program Unggulan Bupati.

4.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat daerah yang mendukung Program Prioritas Kabupaten dan/atau Program Delegasi Gubernur dan/atau Program Prioritas Nasional, Program Strategis Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC);

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya.

LAMPIRAN

Berisikan matriks yang memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan serta Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional tahun 2027.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2025.

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan

Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan IV tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	IKU	IKK	Satuan	Rentra 2025-2029		
					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	√		Nilai	95.5	88.39	92.55
2	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	√		%	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik			%	100	100	100
4	Jumlah perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik..			%	100	100	100
5	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media			Laporan	1	1	100
6	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			komunitas	29	29	100
7	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			Permohonan	12	12	100
8	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			Rekomendasi	1	9	900
9	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik			%	100	100	100
10	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			Media	12	12	100

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	IKU	IKK	Satuan	Rentra 2025-2029		
					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Jumlah Konten Informasi Publik			konten	140	128	91.43
12	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan			Orang	190	268	141.05
13	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik	√		%	100	100	100
14	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah			%	100	100	100
15	Jumlah Buku Statistik Sektoral yang dihasilkan			buku	25	25	100
16	Jumlah forum data yang mendukung penguatan statistik sektoral yang disusun			Keg	2	2	100
17	Jumlah metadata statistik sektoral			Buah	160	155	96.88
18	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu			%	100	100	100
19	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata			Dokumen	1	1	100
20	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE	√		Indeks	4.1	4.45	108.54
21	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	√		%	100	100	100
22	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Angka	3.51	1.42	97.15
23	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai	89.85	85.75	95.44
24	Nilai SPIP Perangkat Daerah			Nilai	3,526	3,825	1,08
25	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			%	100	95.99	95.99
26	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen	4	4	100
27	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	4	6	150

RENJA TAHUN 2027 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	IKU	IKK	Satuan	Rentra 2025-2029		
					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan	3	3	100
29	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Laporan	12	12	100
30	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/bulan	60	60	100
31	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Dokumen	12	12	100
32	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	1	1	100
33	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Unit	10	10	100
34	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Unit	10	10	100
35	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Unit	1	1	100
36	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	12	12	100
37	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	12	12	100
38	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	12	12	100
39	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	12	12	100
40	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Unit	31	31	100
41	Jumlah Mebel yang Dipelihara			Unit	10	0	0

RENJA TAHUN 2027 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	IKU	IKK	Satuan	Rentra 2025-2029		
					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Unit	3	3	100
43	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	2	2	100
44	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	10	10	100
45	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Laporan	1	1	100
46	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Orang	1000	1010	101
47	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Laporan	12	12	100
48	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Paket	12	12	100
49	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Paket	4	4	100
50	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Paket	4	4	100
51	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket	12	12	100
52	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Paket	2	2	100
53	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	52	25	48.08
54	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Dokumen	1	1	100
55	Persentase OPD yang menggunakan infrastruktur TIK yang disediakan Pemda			%	100	100	100
56	Jumlah Nama Domain yang dikelola			domain	359	359	100

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	IKU	IKK	Satuan	Rentra 2025-2029		
					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa			Dokumen	1	1	100
58	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Infrastruktur TIK secara online dan terintegrasi			Perangkat Daerah	56	56	100
59	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			Laporan	1	1	100
60	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional			Dokumen	1	1	100
61	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			aplikasi	6	6	100
62	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas			Unit	56	56	100
63	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			Perangkat Daerah	56	56	100
64	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional			Layanan	1	1	100
65	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			Dokumen	1	1	100
66	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	√		%	100	100	100
67	Persentase sistem elektronik yang diamankan			%	100	100	100
68	Jumlah kegiatan pengamanan informasi			Keg	264	261	98.86

RENJA TAHUN 2027 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	IKU	IKK	Satuan	Rentra 2025-2029		
					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
69	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Laporan	13	13	100
70	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			Perangkat Daerah	56	56	100
71	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika		√	%	N/A	N/A	N/A
72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		√	%	N/A	N/A	N/A
73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		√	%	N/A	N/A	N/A
74	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah		√	%	N/A	N/A	N/A
75	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah		√	%	N/A	N/A	N/A

2.2. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, maka telah diidentifikasi isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 yaitu "Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keterbukaan Informasi Publik."

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mempunyai tugas peran strategis di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas

Analisis tingkat kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk Indeks SPBE Tahun 2025 indeks 4.45 dengan Predikat Memuaskan dan mampu melampaui target indeks 4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk Nilai KIP 88.39 dengan predikat Badan Publik Menuju Informatif dan belum mampu melampaui target nilai 95.5; Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk capaian kinerja program antara lain: berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain yang terkait (baik OPD, instansi, maupun pihak lain), melaksanakan persiapan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dengan rapat koordinasi;
2. Permasalahan yang dihadapi antara lain kurang optimalnya kinerja OPD mitra khususnya dalam pencapaian nilai KIP, serapan anggaran kebanyakan masih dilakukan di akhir tahun, dan perlunya peningkatan kapasitas SDM internal dalam melaksanakan tugas fungsinya.

3. Dampaknya adalah masyarakat kurang optimal terlayani khususnya dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik sesuai ketentuan.
4. Tantangan yang ada adalah untuk mencapai predikat yang lebih tinggi/lebih baik, misalnya dalam hal predikat Badan Publik Menuju Informatif menuju Badan Publik Informatif, mengoptimalkan anggaran dan SDM yang tersedia untuk meningkatkan kinerja OPD, dan meminimalisir risiko yang terjadi atas pelaksanaan kinerja OPD dengan menentukan register risiko OPD.
5. Isu-isu penting dalam bentuk rekomendasi antara lain:
 - a. Melanjutkan pembangunan aplikasi manajemen kinerja terintegrasi dari hulu ke hilir karena agar aplikasi kinerja tidak terfragmentasi.
 - b. Meningkatkan kompetensi dan komitmen para PPID di OPD dan staf pendukungnya agar mampu menyajikan informasi publik yang sesuai regulasi.

2.3. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang dilakukan dalam membantu menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah Inovasi yang akan dilaksanakan di tahun 2027 adalah Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Praktik Kerja Lapangan dan Magang (SIMPEL Magang). SIMPEL Magang adalah sebuah layanan digital berbasis web (web-based system) yang digunakan untuk mengelola proses pengajuan, administrasi, dan pemantauan kegiatan PKL maupun magang secara online di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Sistem ini mempermudah proses yang sebelumnya dilakukan secara manual (pengajuan surat, verifikasi, dan administrasi) menjadi terintegrasi melalui sistem elektronik dan dapat diakses secara online melalui internet oleh calon peserta maupun pihak pengelola.

Tujuan utama inovasi ini adalah

- a. Mempermudah proses pendaftaran PKL dan magang secara online
- b. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi
- c. Mempercepat proses verifikasi dan pengelolaan data peserta
- d. Menciptakan pelayanan publik yang transparan dan tertata
- e. Mengurangi penggunaan dokumen manual atau kertas

Sistem ini ditujukan kepada mahasiswa yang ingin melaksanakan magang, siswa SMK/SMA yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), perguruan

tinggi atau sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan Admin atau pegawai Dinas Kominfo yang mengelola data magang dan PKL.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Dinkominfo Kabupaten Banyumas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kominfo, bidang statistik, dan bidang persandian

Rencana pembangunan daerah disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029. Adapun visi yang ditetapkan adalah: “Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”

Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 diarahkan untuk “Pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan”.

Tujuan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Keterbukaan Informasi Publik.”

Sedangkan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yaitu:

1. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital;

- 2. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan;
- 3. Meningkatnya Keamanan Informasi; dan
- 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ini sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2027
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Keterbukaan Informasi Publik				
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,5
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	97,26
		Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,7
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital			
		Nilai Domain Manajemen SPBE	Angka	3,7
		Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Angka	4,4
		Nilai Domain Layanan SPBE	Angka	4,9
		Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,5
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			
		Nilai Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	0,5
	Meningkatnya Keamanan Informasi			
		Nilai Aspek Audit Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	0,3
		Nilai Aspek Keamanan Siber pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	0,3
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah			
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,9
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,53
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,6

3.2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2025-2029. Visi tersebut yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mencapai Visi tersebut dijabarkan ke dalam (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang kemudian menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan Visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Kemudian dilaksanakan melalui enam misi antara lain:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yang merupakan tahap kedua “Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah” Provinsi Jawa Tengah, difokuskan pada tema pembangunan yaitu “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 diarahkan dengan prioritas daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis lingkungan;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ditetapkan Program Delegasi Gubernur Jawa Tengah yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Program Delegasi Gubernur tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
2. Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta;
3. Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
4. Cek Kesehatan Gratis;
5. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;
6. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan;
7. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
8. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center);
9. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional;
10. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
11. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru;
12. BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng);
13. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat;
14. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clean Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;
15. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;

16. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
17. Peningkatan operasional kader Posyandu;
18. Peningkatan kualitas hidup lansia;
19. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru;
20. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
21. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis;
22. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
23. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
24. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya;
25. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
26. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;
27. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM;
28. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau;
29. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa;
30. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
31. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan;
32. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
33. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
34. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;

35. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”, yang diwujudkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 yaitu “Pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat terutama Pendidikan dan Kesehatan;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan;
4. Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam kolaborasi penanganan isu strategis;

5. Peningkatan daya saing infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;

Dengan mempertimbangkan kebijakan nasional dalam rangka perumusan isu strategis perangkat daerah dengan mendasarkan pada permasalahan, potensi, dan lingkungan yang dinamis maka disampaikan perumusan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Rumusan Arah Kebijakan Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kominfo	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik	Optimalisasi transformasi layanan publik berbasis digital	
2	Kominfo	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik	Peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	
3	Statistik	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik	Penguatan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	
4	Persandian	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas layanan keamanan informasi	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas. Visi Bupati Banyumas adalah "Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil, dan Sejahtera", sedangkan Misi Bupati Banyumas yang didukung adalah Misi ke 6 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah".

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas di Tahun 2027 akan melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan, yang melayani baik perangkat daerah maupun masyarakat luas dengan pagu indikatif total sejumlah Rp.14.275.784.031,00 dengan rincian Rp.14.045.784.031,00 berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Rp.230.000.000,00 berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dapat terlihat pada tabel rencana program dan kegiatan berikut ini.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disajikan dalam matriks Renja Perangkat Daerah yang berisi Program-Subkegiatan beserta indikator, target dan pagunya sebagai berikut:

Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Tahun 2027

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.275.784.031,00				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.275.784.031,00				
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.075.784.031,00				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.008.784.028,52				
		13.008.784.028,52				
		13.008.784.028,52				
		13.008.784.028,52				
		13.008.784.028,52				
		13.008.784.028,52				
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00				
	-	25.000.000,00				
		10.000.000,00				
		15.000.000,00				
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00				
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.179.508.031,00				
	-	8.179.508.031,00				
		108.720.000,00				
		8.070.788.031,00				
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.070.788.031,00				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	8.070.788.031,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.720.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.720.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.274.307,00				
	-	437.274.307,00				
		4.550.000,00				
		169.723.000,00				
		23.048.140,00				
		66.219.087,00				
		23.625.000,00				
		111.153.480,00				
		38.955.600,00				
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.625.000,00				
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.625.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.153.480,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.153.480,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.955.600,00				
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	38.955.600,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.048.140,00				
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	23.048.140,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.219.087,00				
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	66.219.087,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.723.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.723.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.550.000,00				
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.550.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.838.229.000,00				
	-	2.838.229.000,00				
		24.200.000,00				
		2.812.050.000,00				
		1.979.000,00				
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	24.200.000,00				
	Tersedianya Mebel	24.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.812.050.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2.812.050.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.979.000,00				
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.979.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.226.350.690,52				
	-	1.226.350.690,52				
		309.450.690,52				
		916.900.000,00				
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	309.450.690,52				
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	309.450.690,52	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	916.900.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	916.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.422.000,00				
	-	402.422.000,00				
		100.000.000,00				
		187.000.000,00				
		5.900.000,00				
		100.000.000,00				
		9.522.000,00				
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.000.000,00				
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.900.000,00				
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	5.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00				
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00				
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.522.000,00				
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.522.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	327.000.000,00				
		327.000.000,00				
		327.000.000,00				
		327.000.000,00				
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	527.000.000,00				

RENJA TAHUN 2027 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	-	527.000.000,00				
		50.000.000,00				
		47.000.000,00				
		230.000.000,00				
		50.000.000,00				
		50.000.000,00				
		50.000.000,00				
		50.000.000,00				
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	50.000.000,00				
	Terlaksananya Relasi Media	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	50.000.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	230.000.000,00				
	Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	230.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	50.000.000,00				
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	47.000.000,00				
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	47.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	50.000.000,00				
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten	50.000.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Terlaksananya Penyusunan Konten	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	410.000.002,48				
		410.000.002,48				
		410.000.002,48				
		30.000.000,00				
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00				
	-	30.000.000,00				
		30.000.000,00				
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	30.000.000,00				
	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	410.000.002,48				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	-	410.000.002,48				
		20.000.002,48				
		40.000.000,00				
		20.000.000,00				
		30.000.000,00				
		200.000.000,00				
		100.000.000,00				
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	20.000.000,00				
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	30.000.000,00				
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	40.000.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	200.000.000,00				
	Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	100.000.000,00				
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	20.000.002,48				
	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	20.000.002,48	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	100.000.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100.000.000,00				
		100.000.000,00				
		100.000.000,00				
		100.000.000,00				
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00				
	-	100.000.000,00				
		70.000.000,00				
		30.000.000,00				
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	30.000.000,00				
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	70.000.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	70.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.000.000,00				
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.000.000,00				
		100.000.000,00				
		100.000.000,00				
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00				
	-	100.000.000,00				
		15.000.000,00				
		85.000.000,00				
2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	15.000.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					
		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	85.000.000,00				
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	85.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis

Tabel 4.2. Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Banyumas Terhadap Program Unggulan Bupati/TRILAS

No	Program Trilas	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Target Aktivitas	Pagu Anggaran
1	Sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan dan solutif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Infrastruktur Perangkat Keras TIK dalam Kondisi Baik 2. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Infrastruktur TIK secara online dan terintegrasi	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Penerapan aplikasi layanan publik berbasis gawai untuk memudahkan masyarakat berbagai layanan pemerintahan	Aplikasi	1	10.000.000
2	Sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan dan solutif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Infrastruktur Perangkat Keras TIK dalam Kondisi Baik 2. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Infrastruktur TIK secara online dan terintegrasi	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Peningkatan sistem pembayaran digital	Aplikasi	1	5.000.000

Tabel 4.3.1. Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Banyumas Terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten 2027	Program Prioritas OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1	Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam berkolaborasi menangani isu strategis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Infrastruktur Perangkat Keras TIK dalam Kondisi Baik 2. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Infrastruktur TIK secara online dan terintegrasi	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah 2. Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang diamankan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten 2027	Program Prioritas OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik 2. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) 3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 3. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten 2027	Program Prioritas OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 4. Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah				

Tabel 4.3.2 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah) dengan Program Delegasi Gubernur

NO	Program Delegasi Gubernur	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Infrastruktur Perangkat Keras TIK dalam Kondisi Baik 2. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Infrastruktur TIK secara online dan terintegrasi	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE

Tabel 4.3.3 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Program Prioritas Nasional

NO	Program Prioritas Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1	Reformasi politik, hukum dan birokrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Infrastruktur Perangkat Keras TIK dalam Kondisi Baik 2. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Infrastruktur TIK secara online dan terintegrasi	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
2	Reformasi politik, hukum dan birokrasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik 2. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif

NO	Program Prioritas Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				dalam kegiatan relasi media
3	Reformasi politik, hukum dan birokrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 3. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 4. Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.

NO	Program Prioritas Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah				
4	Reformasi politik, hukum dan birokrasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah 2. Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang diamankan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

- 1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyumas Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Nomenklatur Tujuan/Sasaran
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4.45	4.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Keterbukaan Informasi Publik
2	Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	1.7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Keterbukaan Informasi Publik
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	88.39	97.26	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Keterbukaan Informasi Publik
4	Nilai Domain Manajemen SPBE	Angka	2,6	3.7	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
5	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,8	4.4	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
6	Nilai Domain Layanan SPBE	Angka	4,69	4.9	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
7	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	1.5	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
8	Nilai Aspek Audit Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	0.3	Meningkatnya Keamanan Informasi
9	Nilai Aspek Keamanan Siber pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	0.3	Meningkatnya Keamanan Informasi
10	Nilai Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	0.5	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
11	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	1.42	3.53	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
12	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85.75	85,9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
13	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3.825	3.6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah

2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

**Tabel 5.1. Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyumas Tahun 2027**

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	N/A	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	N/A	84
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	N/A	100
4	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	%	N/A	70
5	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	%	N/A	57

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2027.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.
5. Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 ini menyajikan matriks yang memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan serta Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional tahun 2027 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2027 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 31 Juli 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS



BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780522 199703 1 003

Lampiran 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
Tahun 2027

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.008.784.028,52		
			IKM Perangkat Daerah	96 angka	13.008.784.028,52		
			Nilai kematangan organisasi	46 angka	13.008.784.028,52		
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	80,9 %	13.008.784.028,52		
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	13.008.784.028,52		
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	97 %	13.008.784.028,52		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000,00		
					25.000.000,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	15.000.000,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.179.508.031,00		
					8.179.508.031,00		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	108.720.000,00		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	8.070.788.031,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.070.788.031,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	8.070.788.031,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				108.720.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	108.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				437.274.307,00		
					437.274.307,00		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	4.550.000,00		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	169.723.000,00		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	23.048.140,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	66.219.087,00		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	23.625.000,00		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	111.153.480,00		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	38.955.600,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				23.625.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				111.153.480,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	111.153.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.955.600,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	38.955.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.048.140,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.048.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				66.219.087,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	66.219.087,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				169.723.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	169.723.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.550.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.838.229.000,00		
					2.838.229.000,00		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	24.200.000,00		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2.812.050.000,00		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1.979.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Mebel				24.200.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	24.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.812.050.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	2.812.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.979.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.979.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.226.350.690,52		
					1.226.350.690,52		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	309.450.690,52		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	916.900.000,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				309.450.690,52		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	309.450.690,52	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				916.900.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	916.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				402.422.000,00		
					402.422.000,00		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	100.000.000,00		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	187.000.000,00		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5.900.000,00		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	100.000.000,00		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	9.522.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				187.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	187.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan Mebel				5.900.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.522.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	9.522.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				327.000.000,00		
			Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	327.000.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik	87 %	327.000.000,00		
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	75 %	327.000.000,00		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				527.000.000,00		
					527.000.000,00		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-	50.000.000,00		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-	47.000.000,00		
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-	230.000.000,00		
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	50.000.000,00		
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-	50.000.000,00		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	50.000.000,00		
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	50.000.000,00		
	Relasi Media				50.000.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				50.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik				230.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	269852 Orang	230.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik				50.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				47.000.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	55 Orang	47.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				50.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	29 Komunitas	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyusunan Konten				50.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Konten Komunikasi Publik	150 Konten	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				410.000.002,48		
			Persentase Infrastruktur Perangkat Keras TIK dalam Kondisi Baik	100 %	410.000.002,48		
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	84 %	410.000.002,48		
			Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	30.000.000,00		
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		
					30.000.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	-	30.000.000,00		
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				30.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				410.000.002,48		
					410.000.002,48		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-	20.000.002,48		
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	40.000.000,00		
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-	20.000.000,00		
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-	30.000.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	200.000.000,00		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	100.000.000,00		
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				20.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				30.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK				40.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi				200.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	97 Layanan	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				100.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	32 Titik	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah				20.000.002,48		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	97 Aplikasi	20.000.002,48	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				100.000.000,00		
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				100.000.000,00		
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,88 angka	100.000.000,00		
			Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	70 %	100.000.000,00		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100.000.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		
					100.000.000,00		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-	70.000.000,00		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-	30.000.000,00		
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				30.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70 %	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				70.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				100.000.000,00		
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				100.000.000,00		
			Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	57 %	100.000.000,00		
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	530 angka	100.000.000,00		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		
					100.000.000,00		

NO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-	15.000.000,00		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	85.000.000,00		
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				15.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				85.000.000,00		
		Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Sokanegara 0	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13 Laporan	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
					14.275.784.031,00		

Lampiran 2

Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	Penyebarluasan informasi publik tidak tepat dan cepat	Keterbatasan SDM dalam pengelolaan komunikasi publik	Kinerja pelayanan informasi publik tidak optimal	Masyarakat, OPD	Pertemuan rutin SDM Komunikasi Publik	KE	SDM Komunikasi Publiki belum memahami dan melaksanakan tugasnya secara konsisten	Melakukan pelatihan materi teknis peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi publik dan kehumasan	Kabid IKP	TW IV 2027
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	Penyebaran hoaks atau informasi negatif terkait pemerintah daerah	Website resmi pemerintah daerah tidak dikelola dengan baik	Informasi publik sulit diakses oleh masyarakat	Masyarakat, OPD	Himbauan pembaruan konten website resmi	KE	Website resmi belum update dan kurang diminati masyarakat	Melakukan penyebarluasan informasi publik melalui media sosial yang populer secara kontinu	Kabid IKP	TW III 2027